



Analysis of Factors Affecting the Poverty Rate in Nusa Tenggara Barat Province for the Period 2018-2022

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode Tahun 2018-2022

Ni Nengah Yuni Widya Pratiwi ^{1*}, Sahri Sahri ¹, Tuti Handayani ¹

¹ Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Mataram, Indonesia

✉ yuniwidya524@gmail.com

Open Access

This article
contributes to:



Abstract. This study aims to analyse the factors that influence the poverty rate in Nusa Tenggara Barat Province in 2018-2022. This research uses a quantitative method with an associative approach. The type of data used is secondary data. Data sources were obtained from the Central Bureau of Statistics of Nusa Tenggara Barat Province. The research location is in Nusa Tenggara Barat Province with 10 districts / cities. The data analysis used is panel data regression analysis. The results showed that (1), partially population has a negative and significant effect on the poverty rate in Nusa Tenggara Barat Province. (2), partially education has a negative and insignificant effect on the poverty rate in Nusa Tenggara Barat Province. (3) Partially, minimum wage has a negative and insignificant effect on the poverty rate in Nusa Tenggara Barat Province. (4) Partially, unemployment has a negative and insignificant effect on the poverty rate in Nusa Tenggara Barat Province. (5) Simultaneously, the variables of population, education, minimum wage, and unemployment together have a significant effect on the poverty rate in Nusa Tenggara Barat Province.

Keywords: Poverty, Population, Education, Minimum Wage, Unemployment.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018-2022. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Jenis data yang digunakan yaitu jenis data sekunder. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lokasi penelitian di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan 10 Kabupaten/Kota. Analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1), secara parsial jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2), secara parsial pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. (3), secara parsial upah minimum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. (4), secara parsial pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. (5) secara simultan variabel jumlah penduduk, pendidikan, upah minimum, dan pengangguran secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

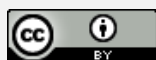
Kata Kunci: Kemiskinan, Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum, Pengangguran.

Article info

Submitted:
2024-1-17

Revised:
2024-3-5

Accepted:
2024-3-5



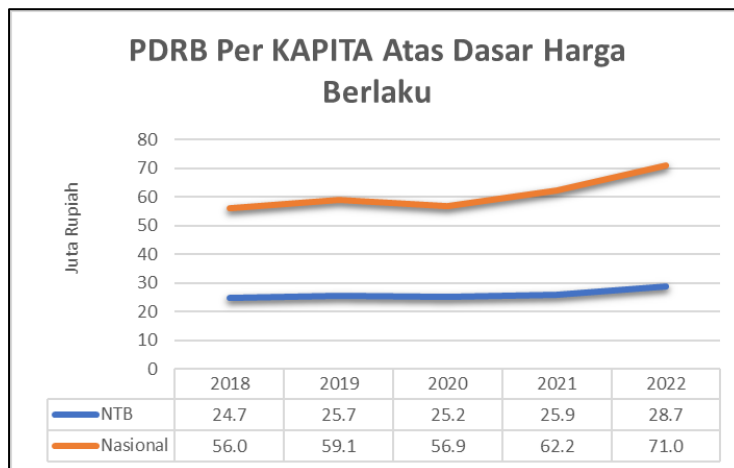
This work is licensed
under a Creative
Commons Attribution
4.0 International
License.

1. Pendahuluan

Kemiskinan menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh negara-negara berkembang di seluruh dunia termasuk juga Indonesia [1]. Dimana Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 38 provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia setelah china, India, dan Amerika. Banyaknya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan lapangan pekerjaan akan mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan ekonomi maupun

sosial seperti kemiskinan [2]. Salah satu provinsi yang mempunyai masalah kemiskinan yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

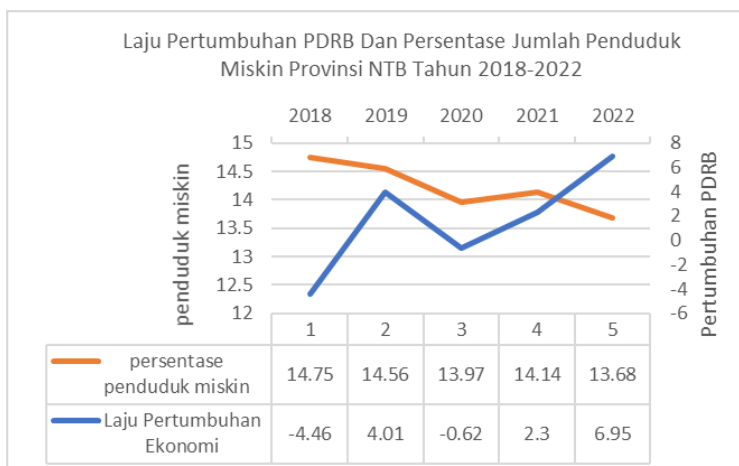
Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 2 kota dan 8 kabupaten yaitu: Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima [3]. Dimana menurut Badan Pusat Statistik, Provinsi Nusa Tenggara Barat menempati peringkat kedelapan menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Angka kemiskinan di Nusa Tenggara Barat yang terus mengalami peningkatan dikarenakan berbagai hal seperti tingkat inflasi, program bantuan miskin yang belum tepat sasaran dan jika dilihat dari pendapatan perkapitanya provinsi Nusa Tenggara Barat memperoleh pendapatan perkapita yang masih tergolong rendah.



Gambar 1
Pendapatan Per
Kapita ADHB
Provinsi NTB
Tahun 2018-
2022 [3]

per tahun 2022 secara nasional pendapatan perkapita Provinsi NTB menempati peringkat ketiga terendah dengan pendapatan perkapita sebesar 28,7 juta. Pendapatan per kapita ini digunakan sebagai salah satu indikator tingkat kemajuan atau kesejahteraan penduduk suatu wilayah, yang artinya jika pendapatan per kapita suatu daerah rendah atau menurun maka kemiskinan di suatu daerah tersebut akan meningkat (Azizah et al., 2018).

Gambar 2 Laju
Pertumbuhan
PDRB Atas Dasar
Harga Konstan
Dan Persentase
Penduduk
Miskin Di
Provinsi NTB
Tahun 2018-
2022 [4]



Dapat dilihat pada gambar 2 di atas, laju pertumbuhan ekonomi dan persentase penduduk miskin Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu lima tahun masih mengalami fluktuasi. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik menunjukkan pada tahun 2018 laju pertumbuhan ekonomi

Provinsi Nusa Tenggara Barat rendah sebesar -4,46% yang disebabkan oleh bencana alam (gempa) yang terjadi pada waktu itu, sehingga berpengaruh terhadap tingginya tingkat persentase penduduk miskin yaitu sebesar 14,75%. Kemudian pada tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 4,01%, yang berpengaruh pada penurunan persentase penduduk miskin sebesar 14,56%. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi kembali mengalami penurunan sebesar -0,62% yang disebabkan

oleh bencana non alam (covid-19), sedangkan persentase penduduk miskinnya tetap mengalami penurunan yaitu sebesar 13,97%.

Kemudian pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi kembali mengalami peningkatan sebesar 2,3%, tetapi persentase penduduk miskin tetap mengalami kenaikan yaitu sebesar 14,14%. Kemudian terakhir pada tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 6,95%, dan tingkat persentase penduduk miskin sebesar 13,68%. Sehingga dari data di atas dapat membuktikan masih rendahnya penurunan tingkat persentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang baik belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan yang signifikan.

Salah satu faktor penyebab kemiskinan yaitu jumlah penduduk. Menurut Tumaleno et al. [5] jumlah penduduk yang banyak akan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Penduduk yang dimaksud yaitu mereka yang menetap dan tinggal di wilayah tertentu. Faktor yang mempengaruhi bertambahnya jumlah penduduk yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (migrasi). Jumlah penduduk yang meningkat akan menyebabkan peningkatan jumlah angkatan kerja.

Peningkatan jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan menimbulkan banyaknya angkatan kerja yang menganggur, sehingga menyebabkan pengangguran yang berakibat pada kemiskinan. Oleh karena itu semakin banyak jumlah penduduk maka kemiskinan akan semakin tinggi.

Tabel 1 Jumlah penduduk, lama sekolah, upah minimum dan tingkat pengangguran provinsi NTB tahun 2018-2022 [3]

Tahun	Penduduk (jiwa)	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Upah Minimum (Rupiah)	Tingkat Pengangguran Terbuka NTB (%)
2018	5.013.687	7,03	1.825.000	3,58
2019	5.070.385	7,27	2.012.610	3,28
2020	5.299.870	7,31	2.183.833	4,22
2021	5.387.148	7,38	2.183.833	3,01
2022	5.473.970	7,61	2.207.212	2,89

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa dalam waktu lima tahun terakhir jumlah penduduk provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan laju pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan. Meningkatnya jumlah penduduk ini yaitu dari 5.013.687 jiwa pada tahun 2018 menjadi 5.473.970 jiwa pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan tingginya angka kelahiran dan banyaknya migrasi yang masuk ke Provinsi Nusa Tenggara Barat dibandingkan dengan jumlah kematian.

Faktor Pendidikan juga menjadi faktor utama dalam bertambahnya angka kemiskinan. Pendidikan merupakan cikal bakal pembangunan masa depan. Pendidikan sangat erat kaitannya dengan pembentukan karakter dan Pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia agar mendapat kehidupan yang lebih baik. Seseorang yang berpendidikan tinggi lebih cenderung memiliki kesempatan kerja dengan gaji yang lebih tinggi dari pada mereka yang berpendidikan rendah [6]. Jika investasi Pendidikan dilakukan secara merata, termasuk pada masyarakat yang berpenghasilan rendah maka kemiskinan akan berkurang [7].

Berdasarkan tabel 1, rata-rata lama sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam waktu lima tahun mengalami peningkatan. Rata-rata lama sekolah tertinggi berada pada tahun 2022 yaitu sebesar 7,61 dan terendah pada tahun 2018 yaitu sebesar 7,03. Semakin tinggi Pendidikan yang ditempuh oleh seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan yang dimilikinya. Karena banyak perusahaan yang mencari tenaga kerja dengan lulusan Pendidikan yang tinggi dan kemampuan atau skill yang dimiliki.

Faktor upah minimum juga dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan suatu daerah. Upah minimum merupakan salah satu indikator untuk mengatasi kemiskinan [8]. Upah

menjadi faktor yang mempengaruhi kesejahteraan rakyat. Upah merupakan bentuk kompensasi suatu satuan kerja berupa uang yang dibayarkan sebagai hasil dari suatu usaha atau pekerjaan oleh tenaga kerja. Upah bagi pekerja sangat penting karena itu merupakan sumber penghasilan bagi dirinya dan keluarganya serta menjadi sumber pembelanjaan. Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, pemerintah harus memperhatikan tingkat upah minimum yang sesuai dengan kebutuhan rakyat serta harga barang dan jasa karena tinggi rendahnya upah akan menjadi faktor penting untuk menentukan taraf hidup rakyat menjadi lebih baik atau sebaliknya [9].

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat dilihat bahwa upah minimum di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Tetapi pada tahun 2020 dan 2021 upah minimum bernilai tetap. Hal ini akibat dari bencana non alam yang terjadi pada waktu itu. Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pengangguran. Menurut Sinaga et al. [10] Pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat, dan itu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai. Semakin turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan.

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada di suatu daerah menjadi semakin serius. Besarnya tingkat pengangguran merupakan cerminan kurang berhasilnya pembangunan di suatu negara. Pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara [10].

Berdasarkan tabel 1 juga diketahui bahwa tingkat pengangguran Provinsi Nusa Tenggara Barat selama lima tahun terakhir (2018-2022) cenderung mengalami penurunan. Tingkat pengangguran terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 2,89% dan Tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 4,22% akibat adanya pandemi virus *covid-19* karena banyaknya perusahaan yang mengalami kebangkrutan hingga akhirnya banyak tenaga kerja yang di PHK secara masal. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode Tahun 2018-2022.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel bebas, seperti jumlah penduduk, pendidikan, upah minimum, dan pengangguran, dengan variabel terikat yaitu tingkat kemiskinan. Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mencakup 10 kabupaten/kota, dengan periode penelitian selama 6 bulan dari Agustus 2023 hingga Januari 2024. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kasus, dengan pengumpulan data secara langsung dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Untuk teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan dokumentasi dan studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, termasuk data deret waktu dan data deret unit dari tahun 2018 hingga 2022. Variabel penelitian terdiri dari variabel terikat, yaitu tingkat kemiskinan, dan variabel bebas, seperti jumlah penduduk, pendidikan, upah minimum, dan pengangguran, yang telah diidentifikasi dan diklasifikasikan.

Prosedur analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi data panel, dengan model regresi yang melibatkan koefisien regresi dan konstanta. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan uji spesifikasi model untuk memilih jenis model yang paling

tepat, seperti uji Chow, uji Hausman, dan uji LM. Setelah itu, dilakukan uji asumsi klasik untuk mengevaluasi kecocokan model, termasuk uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Terakhir, penelitian ini juga melibatkan uji hipotesis untuk menguji signifikansi koefisien regresi dan uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengevaluasi seberapa besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Estimasi Regresi Data Panel

Pertama yaitu Uji chow yang digunakan untuk memilih antara *Common Effect Model (CEM)* atau *Fixed Effect Model (FEM)* yang lebih tepat digunakan.

Tabel 2 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	149.775415	(9,36)	0.0000
Cross-section Chi-square	182.459942	9	0.0000
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10.932722	4	0.0273

Berdasarkan tabel 2, hasil uji chow diperoleh nilai probabilitas chi-square sebesar 0.0000 atau lebih kecil dari 0,05 ($0.0000 < 0.05$) hasil tersebut menunjukkan bahwa model yang dipilih adalah *fixed effect*. Berdasarkan tabel 2 juga diketahui bahwa hasil uji hausman diperoleh nilai probabilitas cross-section random sebesar 0.0273 atau lebih kecil dari nilai signifikan 0.05 ($0.0273 < 0.05$) hasil tersebut menunjukkan bahwa model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.

3.2 Model Estimasi Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel dapat dilakukan dengan tiga model estimasi yaitu *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)* dan *Random Effect Model (REM)*. Berdasarkan hasil uji chow dan uji hausman yang dilakukan pada estimasi data panel dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model (FEM)*. Berikut hasil pengolahan data dari masing-masing model estimasi:

Tabel 3 Hasil Pengolahan Data Menggunakan Model CEM, FEM, REM

Variabel	Value	Model Estimasi		
		CEM	FEM	REM
C	Coefficient	50.39831	105.5761	72.80966
	Std. Error	63.78773	20.90090	15.22454
	t-Statistic	0.790094	5.051273	4.782387
	Prob.	0.4336	0.0000	0.0000
Jumlah Penduduk	Coefficient	-3.977080	-4.457163	-2.936497
	Std. Error	0.540926	1.355432	0.890543
	t-Statistic	-7.352359	-3.288372	-3.297424
	Prob.	0.0000	0.0023	0.0019
Pendidikan	Coefficient	-26.41181	-6.559200	-15.94396
	Std. Error	2.430529	4.362231	3.113273
	t-Statistic	-10.86669	-1.503634	-5.121286
	Prob.	0.0000	0.1414	0.0000
Upah Minimum	Coefficient	4.928712	-1.358763	0.875965
	Std. Error	4.377642	1.395410	1.209122
	t-Statistic	1.125883	-0.973738	0.724463
	Prob.	0.2662	0.3367	0.4725
Pengangguran	Coefficient	-0.731712	-0.134051	-0.215562
	Std. Error	0.262910	0.082736	0.078857

t-Statistic	-2.783121	-1.620227	-2.733594
Prob.	0.0078	0.1139	0.0089
R-squared	0.829816	0.995573	0.557665
Adjusted R-squared	0.814688	0.993975	0.518346
F-statistic	54.85473	622.7866	14.18319
Prob(F-statistic)	0.000000	0.000000	0.000000

Adapun hasil hasil Penelitian ini dengan menggunakan Fixed Effect Model (FEM) dapat dijelaskan melalui persamaan sebagai berikut:

$$Y = 105.5761 - 4.457LOGX_1 - 6.559LOGX_2 - 1.358LOGX_3 - 0.134X_4$$

Keterangan:

Y = Kemiskinan

X1 = Jumlah Penduduk

X2 = Pendidikan

X3 = Upah Minimum

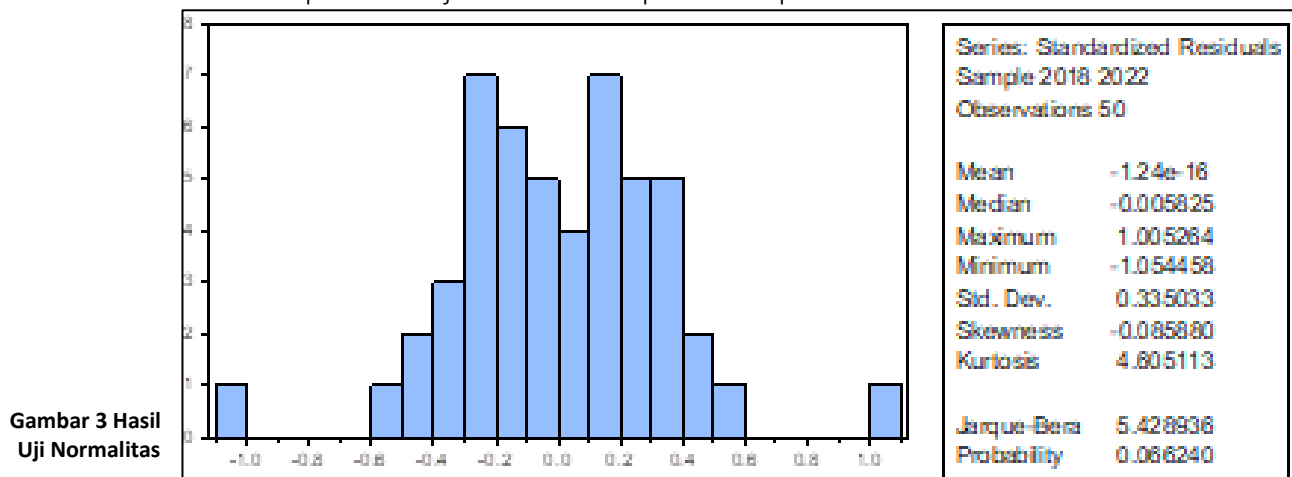
X4 = Pengangguran

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 105.5761 menunjukkan bahwa jika seluruh variabel independen (jumlah penduduk, Pendidikan, upah minimum, dan pengangguran) sama dengan nol, maka tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018-2022 adalah sebesar 105.5761.
2. Variabel jumlah penduduk (X1) mempunyai hubungan yang negatif terhadap variabel kemiskinan dengan nilai sebesar -4.457163. Artinya, setiap kenaikan 1 satuan jumlah penduduk akan menurunkan kemiskinan sebesar 4.457163 dengan menganggap variabel lainnya bernilai tetap. Variabel jumlah penduduk (X1) mempunyai nilai Probabilitas sebesar 0.0023, artinya nilai tersebut lebih kecil dari α yaitu 0.05 atau tingkat signifikansi 5% ($0.0023 < 0.05$). Kesimpulannya adalah variabel jumlah penduduk (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.
3. Variabel pendidikan (X2) mempunyai hubungan yang negatif terhadap variabel kemiskinan dengan nilai sebesar -6.559200. Artinya setiap kenaikan 1 satuan Pendidikan akan menurunkan kemiskinan sebesar 6.559200 dengan menganggap variabel lain bernilai tetap. Variabel Pendidikan (X2) mempunyai nilai probabilitas sebesar 0.1414, artinya nilai tersebut lebih besar dari α yaitu 0.05 atau tingkat signifikansi 5% ($0.1414 > 0.05$). Kesimpulannya adalah variabel Pendidikan (X2) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.
4. Variabel upah minimum (X3) mempunyai hubungan yang negatif terhadap variabel kemiskinan dengan nilai sebesar -1.358763. Artinya setiap kenaikan 1 satuan upah minimum akan menurunkan kemiskinan sebesar 1.358763 dengan menganggap variabel lain bernilai tetap. Variabel upah minimum (X3) mempunyai nilai probabilitas sebesar 0.3367, artinya nilai tersebut lebih besar dari α yaitu 0.05 atau tingkat signifikansi 5% ($0.3367 > 0.05$). Kesimpulannya adalah variabel upah minimum (X3) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.
5. Variabel pengangguran (X4) mempunyai hubungan yang negatif terhadap variabel kemiskinan dengan nilai sebesar -0.134051. Artinya setiap kenaikan 1 satuan pengangguran akan menurunkan kemiskinan sebesar 0.134051 dengan menganggap variabel lain bernilai tetap. Variabel Pengangguran (X4) mempunyai nilai probabilitas sebesar 0.1139, artinya nilai tersebut lebih besar dari α yaitu 0.05 atau tingkat signifikansi 5% ($0.1139 > 0.05$). Kesimpulannya adalah variabel Pengangguran (X4) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.

3.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

Adapun hasil uji normalitas dapat dilihat pada Gambar 3.

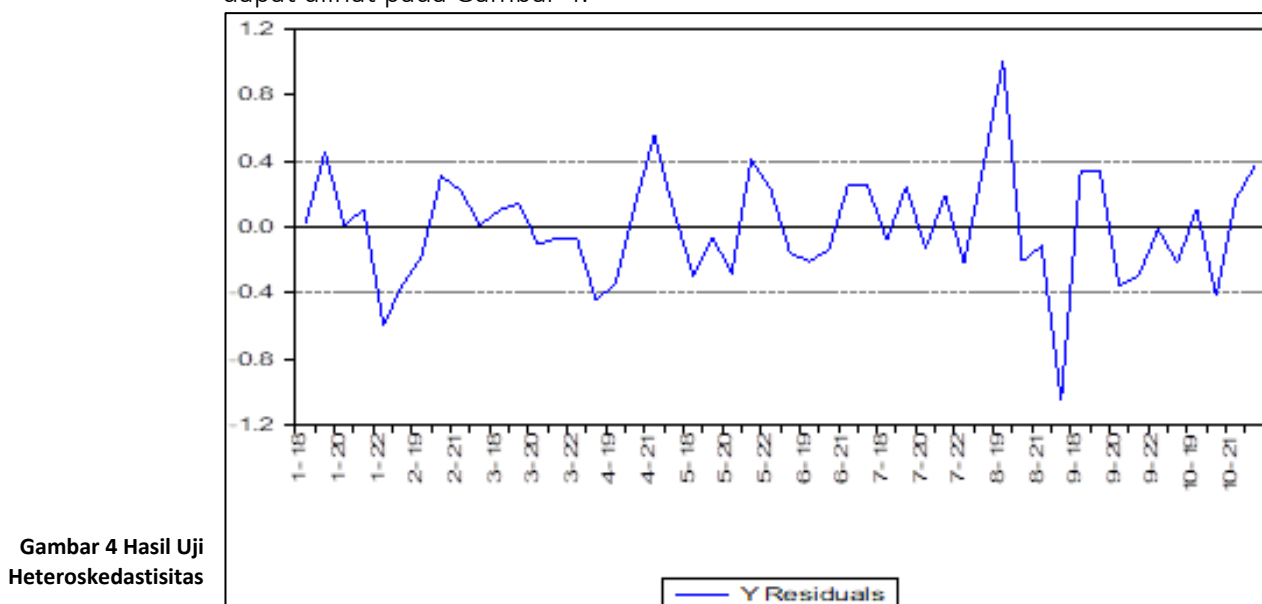


Berdasarkan hasil uji normalitas pada gambar 3 di atas diperoleh nilai probability Jarque-bera sebesar 0,0066240 atau lebih besar dari 0,05 ($0,0066240 > 0,05$) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

	LogX1	LogX2	LogX3	LogX4
LogX1	1.000000	-0.564747	-0.105171	-0.115684
LogX2	-0.564747	1.000000	0.217008	0.502940
LogX3	-0.105171	0.217008	1.000000	0.152819
X4	-0.115684	0.502940	0.152819	1.000000

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4 diatas, diperoleh nilai korelasi antara variabel independent $< 0,80$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas. Selanjutnya hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.



Dari hasil uji heteroskedastisitas nilai residual dapat dilihat tidak ada yang melewati batas (500 dan -500). Artinya varian residual sama. oleh sebab itu tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau lolos uji heteroskedastisitas.

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.995573
Adjusted R-squared	0.993975
F-statistic	622.7866

Prob(F-statistic)	0.000000
Durbin-Watson stat	1.611716

Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel 6, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,611716. Dari nilai DW-tabel yang digunakan, yaitu dL (batas luar) = 1,3779 dan dU (batas dalam) = 1,7214, serta nilai-nilai turunannya, seperti $4 - dU$ dan $4 - dL$, disimpulkan bahwa DW-test terletak pada daerah uji. Meskipun nilai DW berada di antara batas luar dan batas dalam, menunjukkan bahwa data berada di daerah ragu-ragu atau tanpa keputusan yang pasti. Namun, berdasarkan petunjuk dasar pengambilan keputusan terkait keberadaan autokorelasi menurut Ghozali (2013), nilai DW yang berada di rentang -2 sampai +2 menandakan ketiadaan autokorelasi. Oleh karena itu, nilai DW pada output dapat disimpulkan tidak menunjukkan adanya masalah autokorelasi, karena nilai $-2 < 1,611716 < +2$.

3.4 Hasil Uji Hipotesis

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independent (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Hasil uji t pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini:

Tabel 6 Hasil Uji t	Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
	C	105.5761	20.90090	5.051273	0.0000
	LOGX1	-4.457163	1.355432	-3.288372	0.0023
	LOGX2	-6.559200	4.362231	-1.503634	0.1414
	LOGX3	-1.358763	1.395410	-0.973738	0.3367
	X4	-0.134051	0.082736	-1.620227	0.1139

Jika dilihat dari tabel 7, hasil uji t di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Hasil uji t pada variabel jumlah penduduk (x1) diperoleh nilai t hitung sebesar 3,288372 > t tabel yaitu 2,010635 dan nilai probabilitas 0,0023 < 0,05, maka H_0 ditolak atau menerima H_1 yang berarti variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
2. Hasil uji t pada variabel Pendidikan (x2) diperoleh nilai t hitung sebesar 1,503634 < t tabel yaitu sebesar 2,010635 dan nilai probabilitas 0,1414 > 0,05, maka H_0 diterima atau menolak H_1 yang berarti variabel pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
3. Hasil uji t pada variabel upah minimum (x3) diperoleh nilai t hitung sebesar 0,973738 < t tabel yaitu sebesar 2,010635 dan nilai probabilitas 0,3367 > 0,05, maka H_0 diterima atau menolak H_1 yang berarti variabel upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
4. Hasil uji t pada variabel Pengangguran (x4) diperoleh nilai t hitung sebesar 1,620227 < t tabel yaitu sebesar 2,010635 dan nilai probabilitas 0,1139 > 0,05, maka H_0 diterima atau menolak H_1 yang berarti variabel pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Berdasarkan hasil uji t diatas, dapat disimpulkan bahwa hanya variabel jumlah penduduk (x1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan variabel pendidikan (x2), upah minimum (x3), dan pengangguran (x4) mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji F pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini:

Tabel 7 Hasil Uji F

R-squared	0.995573	Mean dependent var	14.30700
Adjusted R-squared	0.993975	S.D. dependent var	5.035476
S.E. of regression	0.390871	Akaike info criterion	1.190620
Sum squared resid	5.500096	Schwarz criterion	1.725986
Log likelihood	-15.76549	Hannan-Quinn criter.	1.394490
F-statistic	622.7866	Durbin-Watson stat	1.611716
Prob(F-statistic)	0.000000		

Jika dilihat dari tabel 7, Nilai f hitung sebesar 622,7866 > f tabel yaitu 2,806845 dan nilai probabilitas $0,000000 < 0,05$ maka H_0 ditolak atau menerima H_1 yang artinya variabel jumlah penduduk, Pendidikan, upah minimum, dan pengangguran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nilai adjusted R-squared sebesar 0,993975 atau 99,3975%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independent yang terdiri dari jumlah penduduk, Pendidikan, upah minimum, dan pengangguran mampu menjelaskan variabel kemiskinan di provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 99,3975%, sedangkan sisanya yaitu 0,6025% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam model penelitian ini.

3.5 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, didapatkan hasil hipotesis sebagai berikut:

3.5.1 Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil uji regresi data panel dengan menggunakan model *Fixed Effect Model* (FEM), variabel jumlah penduduk memiliki nilai koefisien sebesar - 4,457163 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0023 yang artinya berpengaruh signifikan karena nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk mempunyai hubungan yang tidak searah dengan peningkatan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang artinya jika jumlah penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami kenaikan maka tingkat kemiskinan justru mengalami penurunan, begitupula sebaliknya apabila jumlah penduduk mengalami penurunan maka tingkat kemiskinan akan mengalami kenaikan.

Penelitian ini tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Malthus yang mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk sesuai dengan deret ukur sementara pertumbuhan produksi makanan meningkat sesuai deret hitung, yang dapat disimpulkan bahwa ketika jumlah penduduk meningkat dan tidak dapat dikendalikan dengan baik maka akan berimbas pada meningkatnya kemiskinan [11]. Hal ini terjadi dikarenakan jumlah penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih di dominasi oleh usia-usia produktif sehingga kesempatan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masih terbuka lebar.

Menurut Tumaleno et al. [5] tentang pengaruh penduduk pada pembangunan, yang dimana pada pandangan yang kedua yaitu pandangan optimis yang berpendapat bahwa penduduk adalah aset yang memungkinkan untuk mendorong pengembangan ekonomi dan promosi inovasi teknologi dan institusional, sehingga dapat mendorong perbaikan kondisi sosial. Serta para ahli ekonomi klasik yang dipelopori oleh Adam Smith bahkan menganggap bahwa jumlah penduduk merupakan input yang potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi suatu rumah tangga perusahaan. Semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk sebagai pemacu pembangunan akan menggerakkan

berbagai macam kegiatan ekonomi dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga tingkat kemiskinan akan turun.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rismawati, 2018) dengan hasil yang menyatakan bahwa variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap angka kemiskinan di kabupaten gowa dan penelitian yang dilakukan oleh Halimah et al. [12] dengan hasil yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Malang. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiratna and Qibthiyah [13] dengan hasil menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kota Banda Aceh.

3.5.2 Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil uji regresi data panel dengan menggunakan model *Fixed Effect Model* (FEM), variabel pendidikan memiliki nilai koefisien sebesar -6,559200 dengan nilai probabilitas sebesar 0,1414 yang artinya tidak berpengaruh signifikan karena nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara barat.

penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Simmons yang mengatakan bahwa pendidikan melalui kenaikan rata-rata lama sekolah akan memberikan dampak yang cukup besar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga akan menurunkan jumlah penduduk miskin [14]. Namun secara parsial pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, hal ini terjadi dikarenakan terdapat perbedaan dalam kondisi pendidikan dan kualitas pendidikan yang terdapat di setiap daerah sehingga menyebabkan sumber daya manusia yang dihasilkan pun berbeda. Meskipun rata-rata lama sekolah di Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya namun hal ini belum mencerminkan adanya perbaikan kemampuan dan keterampilan masyarakat sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kemiskinan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alashry et al. [15]. Dengan hasil yang mengatakan bahwa pendidikan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinaga et al. [10] dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Lebak.

3.5.3 Upah Minimum Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil uji regresi data panel dengan menggunakan model *Fixed Effect Model* (FEM), variabel upah minimum memiliki nilai koefisien sebesar -1,358763 dengan nilai probabilitas sebesar 0,3367 yang artinya tidak berpengaruh signifikan karena nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara barat.

Penelitian sesuai dengan teori Nurkse, dimana Nurkse menjelaskan bahwa upah yang rendah dibawah minimum akan mempengaruhi tabungan jika tidak ada tabungan maka akan menyulitkan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pokoknya bahkan ada yang tidak mencukupi biaya hidupnya sehingga menimbulkan kemiskinan [8]. Secara teori semakin tinggi upah minimum semakin berpengaruh pula terhadap penurunan angka kemiskinan. Namun variabel upah minimum secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, hal ini

terjadi dikarenakan tidak semua masyarakat mempunyai pendapatan sesuai dengan upah minimum yang telah ditetapkan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alhudhori and Amali [16] dengan hasil yang mengatakan bahwa Upah Minimum berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta.

3.5.4 Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil uji regresi data panel dengan menggunakan model *Fixed Effect Model* (FEM), variabel pengangguran memiliki nilai koefisien sebesar -0,134051 dengan nilai probabilitas sebesar 0,1139 yang artinya tidak berpengaruh signifikan karena nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengangguran berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara barat.

Penelitian ini tidak sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sukirno yaitu besarnya pengangguran menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan pada suatu wilayah [17]. Ini terjadi dikarenakan orang yang menganggur tidak selamanya miskin, selama dia mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Mereka yang masih menganggur dikarenakan masih mencari pekerjaan setelah lulus SMA (Sekolah Menengah Atas) atau PT (Perguruan Tinggi) yang dimana mereka masih mampu memenuhi kebutuhan pokoknya karena biaya hidupnya masih ditanggung oleh orang tua atau keluarganya. Apalagi setiap tahunnya ribuan peserta didik lulus, sehingga banyak yang masih menanggur karena terbatasnya lapangan pekerjaan dan banyak yang berpendidikan tinggi cenderung gengsi jika bekerja tidak sesuai gelarnya.

Disisi lain pemerintah dengan segala program kerjanya berupaya untuk mengurangi atau menurunkan tingkat kemiskinan seperti program BLT (Bantuan Langsung Tunai), Penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial dan lain sebagainya. Sehingga pengangguran akan mengalami peningkatan tetapi kemiskinan justru akan mengalami penurunan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinaga et al. [10] dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Secara parsial, variabel jumlah penduduk (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada periode 2018-2022. Artinya, peningkatan jumlah penduduk dapat berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, variabel pendidikan, upah minimum, dan pengangguran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan dalam periode yang sama. Meskipun secara simultan, variabel jumlah penduduk, pendidikan, upah minimum, dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018-2022. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan dalam variabel-variabel tersebut secara bersama-sama dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Dari hasil kesimpulan tersebut, beberapa saran dapat diajukan. Pertama, kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, disarankan untuk mengambil langkah-langkah yang lebih serius dalam mengatasi masalah kemiskinan. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan kebijakan dan program-program yang efektif, terutama dalam mengelola faktor-faktor seperti jumlah penduduk, pendidikan, upah minimum, dan pengangguran. Kedua, untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperpanjang periode penelitian dan mengeksplorasi variabel-variabel lain yang mungkin memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian,

penelitian selanjutnya dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan kompleks tentang faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di wilayah tersebut.

5. Deklarasi Penulis

Kontribusi dan tanggung jawab penulis - Para penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Para penulis bertanggung jawab atas analisis, interpretasi, dan pembahasan hasil penelitian. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Pendanaan - Penelitian ini tidak menerima dana eksternal.

Ketersediaan data dan bahan - Semua data tersedia dari penulis.

Kepentingan yang bersaing - Penulis menyatakan tidak ada kepentingan yang bersaing.

Apakah Anda menggunakan AI generatif untuk menulis naskah ini? - Saya tidak menggunakan bantuan AI dalam naskah saya.

Deklarasi AI generatif dan teknologi berbantuan AI dalam proses penulisan - Selama persiapan karya ini penulis tidak menggunakan AI untuk menulis, mengedit, atau hal lain yang terkait dengan naskah.

6. Referensi

- [1] M. Abduvaliev and R. Bustillo, 'Impact of remittances on economic growth and poverty reduction amongst CIS countries', *Post-Communist Economies*, vol. 32, no. 4, pp. 525–546, May 2020, doi: 10.1080/14631377.2019.1678094.
- [2] O. A. Adelowokan, O. E. Maku, A. O. Babasanya, and A. B. Adesoye, 'Unemployment, poverty and economic growth in Nigeria', *Journal of Economics and Management*, vol. 35, no. 1, pp. 5–17, 2019.
- [3] BPS NTB, 'Percentage of Poverty in NTB Province 2017-2022', Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Nusa Tenggara Barat 2023. Accessed: Feb. 17, 2024. [Online]. Available: <https://ntb.bps.go.id/publication/2023/12/29/170750832e5d53eda21e810b/indeks-kemahalan-konstruksi-provinsi-nusa-tenggara-barat-2023.html>
- [4] N. N. W. Naraswari, A. Manan, and E. Agustiani, 'The Effect of Gross Regional Domestic Product (GRDP), Investment, Population, and Inflation on Regional Original Revenue (PAD) of Nusa Tenggara Barat Province (NTB) in 2010-2022', *Socio-Economic and Humanistic Aspects for Township and Industry*, vol. 1, no. 4, Art. no. 4, 2023, doi: 10.59535/sehati.v1i4.194.
- [5] A. F. Tumaleno, K. R. Riazis, and Rosnawintang, 'Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Sulawesi Tenggara', *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, vol. 2, no. 3, Art. no. 3, Dec. 2022, doi: 10.57250/ajsh.v2i3.135.
- [6] P. M. Riset, 'Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi', *Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Jakarta*, 2018.
- [7] A. F. Dira, K. P. Utomo, M. F. A. Bangun, E. Y. Pramularso, and F. Syarif, 'Pengaruh Investasi dan IPM terhadap Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Provinsi Kalimantan Timur', *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, vol. 11, no. 2, Art. no. 2, Jul. 2023, doi: 10.37676/ekombis.v11i2.4181.
- [8] E. K. Kiha, S. Seran, and G. Seuk, 'Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto Dan Upah Minimum Regional Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Propinsi Nusa Tenggara Timur', *INVEST : Jurnal Inovasi Bisnis dan Akuntansi*, vol. 2, no. 1, Art. no. 1, Mar. 2021, doi: 10.55583/invest.v2i1.128.
- [9] A. Elcaputera, 'Kewenangan pengawasan pemerintah provinsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah', *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, vol. 6, no. 1, pp. 22–38, 2021.
- [10] M. Sinaga, S. W. H. Damanik, R. S. Zalukhu, R. P. S. Hutauruk, and D. Collyn, 'Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Per Kapita Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kepulauan Nias', *Jurnal Ekuilnomi*, vol. 5, no. 1, Art. no. 1, Jun. 2023, doi: 10.36985/ekuilnomi.v5i1.699.
- [11] S. Amar and I. Pratama, 'Exploring the link between income inequality, poverty reduction and economic growth: An ASEAN perspective', *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, vol. 11, no. 2, pp. 24–41, 2020.
- [12] H. Halimah, M. Misnawati, S. R. Lestariningsy, Y. Mingvianita, S. Sepmattie, and R. I. Suryatini, 'Implementasi Pancasila Sebagai Entitas Dan Identitas Pendidikan Abad Ke-21 Di SMAN 4 Palangka Raya', *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, vol. 2, no. 1, pp. 119–133, 2023.

- [13] H. Budiratna and R. M. Qibthiyyah, 'Evaluasi Atas Transfer Dana Otonomi Khusus Di Aceh, Papua, Dan Papua Barat', *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, vol. 1, no. 05, pp. 402–414, Dec. 2020, doi: 10.59141/jiss.v1i05.103.
- [14] L. Sugiharti, R. Purwono, M. A. Esquivias, and H. Rohmawati, 'The Nexus between Crime Rates, Poverty, and Income Inequality: A Case Study of Indonesia', *Economies*, vol. 11, no. 2, p. 62, 2023.
- [15] S. A. A.-N. Alashry, A. A.-S. Qoura, and R. H. A.-A. Gohar, 'The Impact of Frayer Model and Contextual Redefinition strategy on Improving Preparatory Stage Pupils' Vocabulary Learning', *Journal of Research in Curriculum Instruction and Educational Technology*, vol. 4, no. 4, pp. 11–36, Oct. 2019, doi: 10.21608/jrciet.2019.31954.
- [16] M. Alhudhori and M. Amali, 'Pengaruh pendapatan dan konsumsi rumah tangga terhadap kesejahteraan keluarga petani penggarap sawit di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi', *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, vol. 5, no. 1, pp. 153–158, 2020.
- [17] S. A. Arismutia, 'Pengaruh Penghargaan Finansial Dan Pertimbangan Pasar Kerja Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Berkarir Menjadi Akuntan Publik (Studi Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi STIE INABA Bandung)', vol. 16, no. 2, 2017.

Publisher's Note – Tinta Emas Institute stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.